



**IMPLEMENTASI PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN  
SARANA PERTANIAN UNTUK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN  
PETANI PERKEBUNAN KELAPA OLEH DINAS PERKEBUNAN  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

**SKRIPSI**

Dijadikan Sebagai Salah Satu Syarat Memenuhi Guna Mendapatkan Gelar Sarjana  
(S1) Pada Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



Oleh:

**MUHAMMAD OLIF PASHA**  
NIM. 11970514739

**PROGRAM STUDI S1 ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**PEKANBARU**

**1445 H/2023 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk dipublikasikan dalam bentuk cetak atau elektronik tanpa izin dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

: Muhammad Olif Pasha  
 : 11970514739  
 : Administrasi Negara  
 : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 : Implementasi Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana  
 Pertanian Untuk Peningkatan Kesejahteraan Petani Perkebunan Kelapa  
 Oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir

**DISETUJUI OLEH:  
 DOSEN PEMBIMBING**

**Irdavanti, S. IP., MA**  
 NIK. 130 411 030

Mengetahui

**DEKAN**  
**Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial**

**KETUA PRODI**  
**Administrasi Negara**

UIN SUSKA RIAU

**Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si**  
 NIP. 19781025 200604 1 002

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University Sunan Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menjiplak, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerjemahan atau kajian tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Dr. M. M. M. M. M.**  
 NIP. 19781025 200604 1 002



**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

: Muhammad Olif Pasha  
 :11970514739  
 : Administrasi Negara  
 : Ekonomi Dan Ilmu Sosial  
 : Implementasi Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian  
 Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani Perkebunan Kelapa Oleh  
 Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir  
 : Kamis, 30 November 2023

**Tim Penguji**

Ketua penguji  
Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si  
 NIP.19781025200604 1 002

Penguji I  
Dr. Mustiqowati Ummul F, M. Si  
 NIP. 19791127200801 2 010

Penguji II  
Abdiana Ilosa, S.AP, MPA  
 NIP. 19870716201503 2 003

Sekretaris  
Virna Museliza, SE, M. Si  
 NIK. 130 712 073

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

1. Dilarang menjiplak atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Lampiran Surat :  
 Nomor : Nomor 25/2021  
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Olif Pasha  
 NIM : 11970514739  
 Tempat/Tgl. Lahir : Tembilahan, 20 Januari 2001  
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 Prodi : Administrasi Negara  
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

Implementasi Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana  
 Pertanian Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani Perkebunan  
 Kelapa Oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Batubaru, 27 Desember 2023

buat pernyataan



Muhammad Olif Pasha  
 NIM : 11970514739

\*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



## ABSTRAK

### **IMPLEMENTASI PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN UNTUK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI PERKEBUNAN KELAPA OLEH DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Oleh:

**MUHAMMAD OLIF PASHA**  
**NIM. 11970514739**

#### **Abstrak :**

Pertanian memiliki peranan yang sangat besar untuk kelangsungan hidup masyarakat di Indonesia. Maka perlu diperhatikan kebijakan-kebijakan yang ada agar hasil pertanian di Indonesia lebih maju dan meningkat. Masalah pokok yang timbul dari kesenjangan pembangunan tersebut terutama dalam hal pendapatan. Pendapatan hingga saat ini masih menjadi tolak ukur bagi kesejahteraan dan status sosial masyarakat. Penelitian ini bertujuan mengetahui Implementasi Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian untuk peningkatan kesejahteraan petani perkebunan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir serta mengetahui tingkat produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar perkebunan kelapa Kabupaten Indragiri Hilir. Tipe penelitian ini deskriptif kualitatif melalui teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dokumentasi. Berdasarkan uraian hasil penelitian berupa wawancara, studi dokumentasi, dan observasi yang peneliti lakukan mengenai pengimplementasian Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana melalui Teori Implementasi Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pengimplementasian Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian belum tercapai sepenuhnya secara angka. Namun tidak dapat dipungkiri dampak program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian bagi petani kelapa sudah cukup terasa dan membawa dampak positif bagi masyarakat Indragiri Hilir.

**Kata Kunci:** Implementasi, Pembangunan, Program Pengembangan, Pertanian dan Perkebunan, Kesejahteraan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
Sultan Syarif Kasim Riau

## ABSTRACT

### IMPLEMENTATION OF THE PROGRAM FOR THE PROVISION AND DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL FACILITIES TO IMPROVE THE WELFARE OF COCONUT PLANTATION FARMERS BY THE INDRAGIRI HILIR DISTRICT PLANTING OFFICE

By :  
**MUHAMMAD OLIF PASHA**  
**NIM. 11970514739**

**Abstract:**

*Agriculture has a very big role in the survival of society in Indonesia. So it is necessary to pay attention to existing policies so that agricultural output in Indonesia is more advanced and increases. The main problem that arises from the development gap is mainly in terms of income. Until now, income is still a benchmark for people's welfare and social status. This research aims to determine the implementation of the Program for the Provision and Development of Agricultural Facilities to improve the welfare of plantation farmers by the Plantation Service of Indragiri Hilir Regency and to determine the level of production, productivity, quality, added value, competitiveness and market share of coconut plantations in Indragiri Hilir Regency. This type of research qualitative descriptive through data collection techniques using observation, interviews, documentation. Based on the description of the research results in the form of interviews, documentation studies, and observations conducted by researchers regarding the implementation of the Program for the Provision and Development of Facilities through Implementation Theory according to Daniel A. Mazmanian and Paul A. Sabatier, it can be concluded that the objectives of implementing the Program for the Provision and Development of Agricultural Facilities have not been achieved completely numerically. However, it cannot be denied that the impact of the program to provide and develop agricultural facilities for coconut farmers has been quite felt and has had a positive impact on the people of Indragiri Hilir.*

**Keywords:** *Implementation, Development, Development Program, Agriculture and Plantation, Welfare*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.**

Alhamdulillahirobbil’alamin, penulis mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis. Kemudian Shalawat beriring salam kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN UNTUK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI PERKEBUNAN KELAPA OLEH DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR”**.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan akademis menyelesaikan pendidikan Program Studi S1 Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, terutama kepada dua orang paling berjasa dalam hidup penulis, Orang Tua tercinta, ibunda Yunita dan ayahanda Robinsyah. Terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan atas izin merantau dari kalian, serta yang selalu hadir dengan cinta, doa dan merupakan kekuatan terbesar bagi penulis, yang telah membesarkan, mendidik, dan memberikan kasih sayang yang tulus. Serta cinta kasih adik perempuan saya, Alya Meylandha. Terima kasih atas segala doa dan motivasi



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang telah diberikan kepada adik terakhir ini. Dan juga tanpa lelah memberikan segala yang terbaik untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu menjaga kalian dalam kebaikan dan kemudahan aamiin. Selain itu ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada:

1. Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan nikmat sehat dan kelancaran dalam proses penulisan skripsi ini.
2. Bapak Prof. DR. Khairunnas Rajab, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberi fasilitas dengan kebijakan-kebijakannya.
3. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, yang memfasilitasi dengan kebijakan-kebijakannya
4. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si. selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, yang memfasilitas dengan kebijakan-kebijakannya.
5. Bapak Dr. Mahmuzar, SH., M.Hum. selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, yang memfasilitas dengan kebijakan-kebijakannya.
6. Ibu Dr. Hj. Juli na, SE., M.Si. selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, yang memfasilitas dengan kebijakan-kebijakannya.
7. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si. selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara, yang memfasilitas dengan kebijakan-kebijakannya.





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

8. Bapak Mashuri S.Ag., M.A selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Negara, yang memfasilitas dengan kebijakan-kebijakannya.
9. Ibu Irdayanti, S. IP., MA. selaku Dosen Pembimbing yang sangat banyak membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian dan mempermudah segala urusan selama bimbingan semoga segala kebaikan ibu dibalas oleh Allah swt nantinya.
10. Bapak Muammar Alkadafi, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik yang dengan segala keramahan serta arahan yang diberikan selama masa perkuliahan.
11. Bapak Abdurrahman, S.Pi, M.Si selaku Sekretaris Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir atas informasi dan wawasan serta data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
12. Bapak Erfan Abdul Razak, SP. selaku Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir, atas segala bantuan yang telah banyak diberikan dan informasi wawasan serta data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
13. Bapak Redi Setiawan, SP selaku Perwakilan Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir, atas informasi dan wawasan serta data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
14. Sahabat serta teman-teman seperjuangan Administrasi Negara Lokal D Angkatan 2019 yang tidak dapat penulis sebutkan nama nya satu persatu.
15. Teman-teman yang saya temui di awal semester hingga saat ini Muhammad Pirdaus, Ilham Alghifary, Muhammad Rizki, Aldo Perdana Putra, Muhammad



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ryan Dhito serta saudara Arta Okber selaku rekan satu bimbingan dan teman seperjuangan, terima kasih telah menjadi teman proses belajar penulis hingga penyusunan skripsi ini

16 Sahabat seperjuangan Muhammad Pirdaus, Rio Febrian, dan Arta Okber yang telah menjadi rumah yang tidak hanya berupa tanah dan bangunan, terima kasih karena selalu sabar mendengarkan keluh kesah di masa perkuliahan penulis.

17 Terakhir, diri penulis sendiri, Muhammad Olif Pasha atas segala kerja keras dan semangatnya sehingga tidak menyerah dalam mengerjakan penulisan skripsi ini. Semoga penulis tetap selalu rendah hati dan semoga dengan langkah awal yang baik ini langkah kedepan penulis dipemudah oleh Allah SWT, aamiin ya Rabbal'alamin.

Pekanbaru, Oktober 2023

Penulis

**MUHAMMAD OLIF PASHA**

NIM.11970514739

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>14</b>
2.1 Kebijakan Publik .....	14
2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik.....	14
2.1.2 Implementasi Kebijakan Publik .....	16
2.2 Implementasi Program.....	20
2.3 Evaluasi .....	21

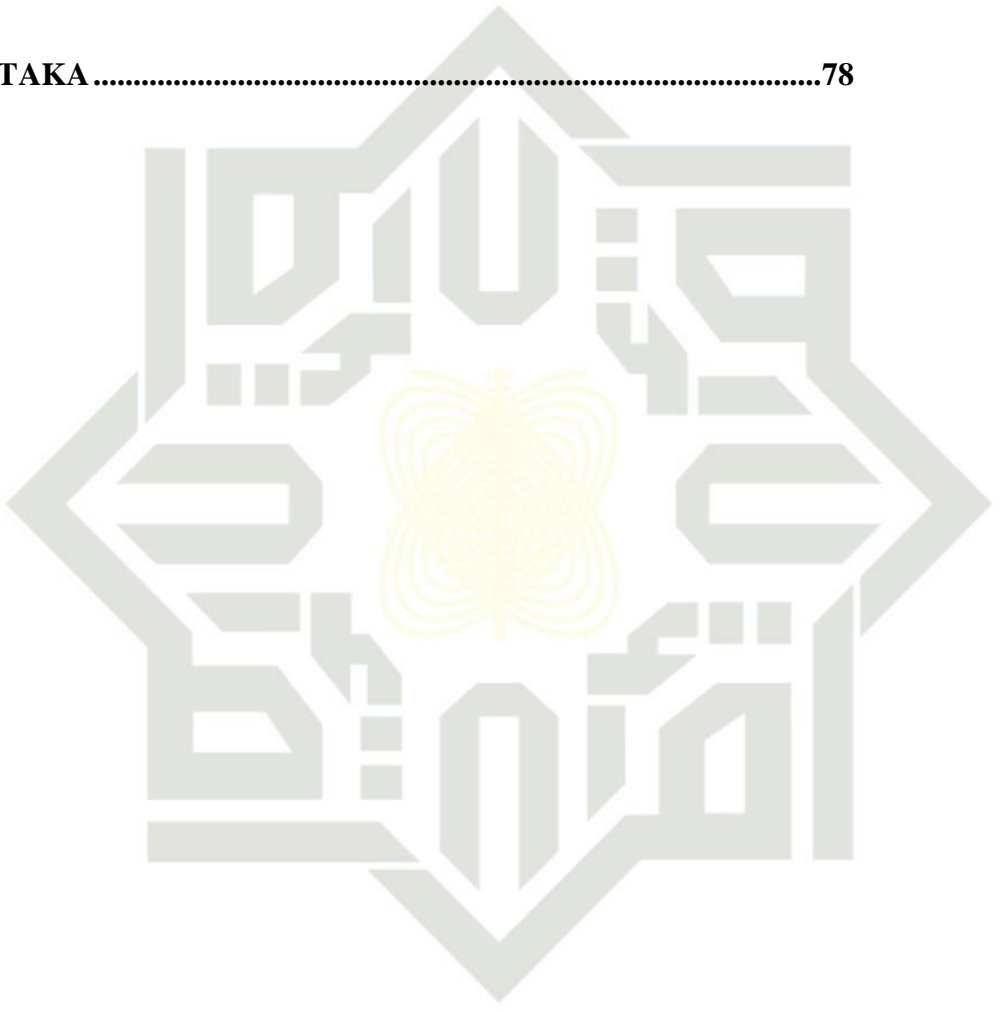




- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4 Rencana Strategis (RENSTRA).....	22
2.5 Penelitian Terdahulu.....	25
2.6 Defenisi Konseptual.....	27
2.7 Konsep Operasional.....	28
2.8 Kerangka Pemikiran .....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>32</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	32
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	33
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	33
3.4 Informan Penelitian .....	34
3.5 Teknik Analisis Data .....	38
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN.....</b>	<b>40</b>
4.1 Gambaran Umum Dinas Perkebunan .....	40
4.1.1 Pengertian Dinas Perkebunan .....	40
4.3 Visi Dan Misi Dinas Perkebunan.....	47
4.4 Struktur Organisasi Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir .....	48
<b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>49</b>
5.1 Karakteristik Dari Masalah .....	49
5.2 Karakteristik Kebijakan/Undang-Undang.....	56

6.3 Variabel Lingkungan .....	69
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>74</b>
6.1 Kesimpulan.....	74
6.2 Saran.....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>78</b>



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1	Data Kelompok Tani Kabupaten Indragiri Hilir .....	6
Tabel 1.2	Jumlah Petani Pemilik Tanaman (KK) .....	7
Tabel 1.3	Produksi, Produktivitas Dan Jumlah Petani Pemilik Tanaman Tahunan Perkebunan Rakyat Kabupaten Indragiri Hilir.....	10
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu.....	23
Tabel 2.2	Konsep Operasional .....	28
Tabel 5.1	Jumlah Penduduk Miskin .....	79
Tabel 5.2	Data Terpilah Gender Dinas Perkebunan .....	80
Tabel 5.3	Data Kelompok Tani Kabupaten Indragiri Hilir 2021- 2022 ...	83



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran .....	30
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir .....	77
Gambar 5.1	Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (MOU) Pembangunan Perkebunan Kelapa Pola Kemitraan Bagi Hasil Antar Perusahaan .....	88
Gambar 5.2	Kerja Sama Dinas Perkebunan dan Dinas Pariwisata .....	89
Gambar 5.3	Sosialisasi Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Kepada Masyarakat .....	91
Gambar 5.4	Monitoring Lahan Masyarakat Untuk Pelaksanaan Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana .....	92
Gambar 5.5	Pengukuran Tanggul Swakelola Milik Masyarakat .....	93

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan alam yang sangat luar biasa karena Indonesia terletak pada daerah tropis yang memiliki curah hujan tinggi dan sinar matahari hampir sepanjang waktu yang membuat tumbuhan tumbuh subur kemudian memiliki banyak pegunungan yang kaya akan mineral dan memiliki perairan yang luas yang kaya akan hewan laut dan juga Indonesia memiliki tanah subur yang melimpah. Dengan kekayaan alam yang melimpah terutama di bidang pertanian membuat Indonesia dikenal sebagai negara agraris karena sebagian besar penduduk Indonesia memiliki profesi sebagai petani atau bercocok tanam dan Indonesia adalah penghasil utama dari berbagai produk pertanian tropis. Selain itu, Indonesia juga dikenal dengan hasil perkebunannya, antara lain kelapa dalam, kelapa sawit, karet, sagu, tembakau, kapas, kopi, tebu, dan pinang, dan masih banyak lagi (Azizah, 2020).

Sektor pertanian saat ini masih menjadi sorotan utama di Indonesia. Baik dari segi produksi, lahan, kualitas, hingga keadaan petaninya. Sektor pertanian di Indonesia masih menjadi sektor utama dalam pembangunan perekonomian, hal ini dikarenakan kontribusi sektor pertanian terhadap PDB cukup besar. Selain itu, penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian pun terbilang cukup tinggi. Oleh karenanya pemerintah terus meningkatkan upaya pembangunan pertanian (Selistyowati Lies, 2019).



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kualitas petani di Indonesia masih terbilang kurang, terlebih petani di Indonesia kebanyakan sudah berusia lanjut sehingga kemampuannya dalam bekerja semakin berkurang. Dengan kurangnya kualitas petani yang baik di Indonesia mengakibatkan minimnya pendapatan yang diperoleh petani, dengan minimnya pendapatan yang diterima oleh petani dari sektor pertanian ini mengakibatkan kesejahteraan petani terbilang masih rendah. Apabila kesejahteraan petani rendah, maka petani tersebut termasuk kedalam golongan masyarakat miskin, sehingga tidak heran jika kebanyakan di Indonesia, masyarakat miskin didominasi oleh petani yang berada di pedesaan (I Made Suryana, 2016).

Dalam konsep negara agraris, sektor pertanian memegang peranan yang sangat penting terhadap taraf kehidupan masyarakat. Kehidupan yang baik merupakan tujuan yang utama dari petani yang mana bergantung dari pendapatan yang diperoleh dari hasil panen, akan tetapi pada kenyataan yang ada dilapangan banyak petani yang mempunyai penghasilan rendah sehingga sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan para petani tersebut. Pembangunan dalam sektor pertanian juga sangat penting dikarenakan banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya di bidang ini khususnya daerah pedesaan. Salah satu daerah yang mengembangkan sektor pertanian adalah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau (Sari, 2021).

Pertanian memiliki peranan yang sangat besar untuk kelangsungan hidup masyarakat di Indonesia. Maka perlu diperhatikan kebijakan-kebijakan yang ada agar hasil pertanian di Indonesia lebih maju dan meningkat. Tentunya sebagai





sebuah negara kepulauan, Indonesia memiliki banyak Provinsi dengan segala keberagamannya, salah satunya ialah provinsi Riau. Provinsi ini memiliki kekayaan alam yang luar biasa banyak, sehingga di berikan hak otoritas yang di khususkan. Kekayaan alam yang di miliki oleh Riau adalah dalam sektor pertanian.

Masalah pokok yang timbul dari kesenjangan pembangunan tersebut terutama dalam hal pendapatan. Pendapatan hingga saat ini masih menjadi tolak ukur bagi kesejahteraan dan status sosial masyarakat. Perbedaan yang terlalu timpang akan menimbulkan masalah-masalah sosial ditengah-tengah masyarakat. Dalam konteks pembangunan, ketimbangan distribusi pendapatan akan menghambat pembangunan nasional. Karenanya redistribusi pendapatan harus terlaksana secara lebih adil (Riswanto, 2019).

Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) merupakan salah satu daerah yang mengembangkan sektor pertanian khususnya sub sektor perkebunan kelapa yang dimana komoditi ini mempunyai potensi menjadi perkebunan kelapa terbesar di dunia. Pada umumnya masyarakat di Kabupaten Inhil bermata pencarian sebagai petani sebanyak 70%. Perkebunan kelapa yang ada di Kabupaten Inhil secara umum merupakan kelapa rakyat dengan luas 461.310 hektar dengan potensi sebanyak 592.81 ton Kopro/ Tahun. Provinsi riau memiliki area perkebunan kelapa yang cukup luas, kurang lebih 579.399 sekitar 80% berada di Kabupaten Inhil (BPS Kabupaten Inhil, 2021).

Subsektor pertanian kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu tulang punggung perekonomian bagi masyarakat. Saat ini petani kelapa di

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Indragiri Hilir Provinsi Riau sangat bergantung pada pihak tengkulak atau pedagang pengumpul yang menampung hasil dari pertanian kelapa di wilayah tersebut. Adapun alasan yang menyebabkan petani tidak melakukan pemasaran langsung ke perusahaan dikarenakan adanya keterbatasan yang dimiliki petani seperti sarana prasarana yang kurang memadai. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir saat ini belum mengeluarkan kebijakan khusus mengenai pertanian kelapa dan terlalu membiarkan perusahaan yang bergerak di bidang agroindustri untuk membuat kebun sendiri bagi pasokan bahan baku industrinya. Pihak perusahaan mampu mandiri dengan hasil pertanian kelapa sebagai bahan baku industrinya.

Perusahaan juga bebas untuk menekan harga pembelian hasil petani sehingga mengakibatkan harga tidak stabil. Sementara itu, pemerintah daerah baru menerbitkan Peraturan Daerah Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2018 dalam pasal 3 menyatakan bahwa tata jual beli kelapa di daerah bermaksud untuk menjaga ketetapan harga kelapa pada tingkat yang wajar, memperkuat peran pengusaha kelapa sebagai pedagang perantara, menjaga stabilitas pasokan bahan baku industri kelapa daerah (Saputra, 2022).

Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu daerah sentra penghasil kelapa di Indonesia, serta berpotensi menjadi hamparan kebun kelapa terluas di dunia. Di Kabupaten Indragiri Hilir pohon-pohon kelapa tumbuh dengan subur pada lahan-lahan yang semula hutan rawa-rawa gambut. Kontribusi perkebunan kelapa dari INHIL menjadikan Indonesia secara keseluruhan sebagai sentra perkebunan kelapa terbesar di dunia. Sebagai negara pemilik kebun kelapa terluas di dunia, Indonesia mempunyai perkebunan seluas 3,7 juta hektar yang tersebar di

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kepulauan kelapa. Provinsi Riau memiliki areal perkebunan kelapa yang cukup luas, kurang lebih 579.399 hektar, sekitar 80 % berada di kabupaten Indragiri Hilir (Ariana, 2016).

Perekonomian Masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir, khususnya kesejahteraan Petani Kelapa karena hampir 70% mata pencaharian masyarakat kabupaten Indragiri Hilir adalah petani kelapa. Para petani kelapa menjerit dan mengeluh dengan harga kelapa yang tidak sesuai dengan perkiraan mereka, karena saat harga kelapa turun maka perekonomian di Indragiri Hilir otomatis akan ikut turun hal ini juga berpengaruh terhadap pendidikan anak para petani kelapa yang harus terancam berhenti sekolah karena kekurangan biaya untuk melanjutkan pendidikannya dan juga banyak petani kelapa yang terlilit hutang karena tidak ada modal untuk memperbaiki perkebunan kelapa mereka.

Adapun tingkat kesejahteraan petani kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat dari Indikator Nilai Tukar Petani. Dimana Nilai Tukar Petani adalah perbandingan antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani dalam presentase, yang mana nilai tukar petani juga merupakan suatu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan atau kemampuan daya beli petani (Anggrain, 2019).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 1.1**  
**Data Kelompok Tani Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021-2022**

No	Kecamatan	Jumlah	
		2021	2022
	Enok	170	185
	Concong	45	68
	Pelangiran	112	127
	Kateman	57	67
	Gaung	92	107
	Tempuling	158	160
	Kempas	116	117
8	Kemuning	154	170
9	Batang Tuaka	124	145
	Jumlah	1.028	1.146

Sumber: Data Terpilah Gender Dinas Perkebunan, 2022

Dari data diatas dapat dilihat jumlah untuk tahun 2022 kelompok tani perkebunan mengalami jumlah peningkatan kelompok tani. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran akan masyarakat terhadap status kelompok sudah meningkat dibanding tahun sebelumnya. Kelompok tani yang tidak aktif itu merupakan kelompok tani yang hanya mengharapkan bantuan. Apabila tidak mendapat bantuan maka kelompok tani tersebut tidak bergerak ataupun melakukan aktivitas kelompok tani. Dari permasalahan tersebut maka Dinas Perkebunan melalui program penyediaan dan pengembangan sarana memberikan pendamping dan pembinaan untuk kelompok tani yang ada. Baik berupa pendampingan tentang permasalahan tanaman perkebunan yang ada pada petani tersebut ataupun masalah pembinaan kelompok.

Menurut data dari Dinas Perkebunan Kabupaten Inhil dikatakan bahwa perkebunan kelapa yang ada di Inhil terluas di dunia dan 80 persennya adalah milik masyarakat setempat mencapai 431.000 hektare, disisi lain perkebunan kelapa saat ini yang mengalami kerusakan telah mencapai 100.000 hektar.

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Petani Pemilik Tanaman (KK)**

Kabupaten	Jumlah Petani Pemilik Tanaman (KK)		
	2020	2021	2022
Indragiri Hilir	81,018	81,177	81,198

Sumber : Bps Kabupaten Indragiri Hilir, 2020

Untuk diketahui, berdasarkan data dari panitia pelaksana (data BPS), jumlah petani pemilik tanaman (KK) di Inhil di tahun 2020 berjumlah 81,018 Kartu Keluarga. Jumlah ini menurun dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 81,177 Kartu Keluarga, dan ditahun 2022 mencapai 81,198 Kartu Keluarga. Rendahnya produktivitas rata-rata kelapa Indragiri Hilir tidak terlepas dari luasnya lahan yang tua dan rusak. Saat ini tidak kurang dari 1.035 hektar lahan yang telah rusak dan mati akibat terendam air laut sebagai akibat rusaknya tanggul-tanggul, prasarana dan sarana penunjang, serangan hama dan masih ada beberapa permasalahan sesuai fungsi pelayanan OPD.

Dilihat dari Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perkebunan ada permasalahan yang terkait dengan bidang prasarana dan sarana adalah masih rendahnya tingkat kemampuan petani dalam melakukan perbaikan/pemeliharaan sarana, prasarana dan infrastruktur kebun, sementara laju kerusakan kebun justru



semakin besar per tahunnya, terdegradasinya kemampuan lingkungan di dalam menahan laju infiltrasi (intrusi) air laut, sehingga luas kebun yang rusak dan kritis semakin bertambah. Di sisi lain, kemampuan untuk melakukan kegiatan penanggulangan kebun yang rusak dan kritis oleh Dinas Perkebunan, dibatasi oleh ketersediaan dana dan sumber daya yang ada masih rendah.

Permasalahan yang terkait dengan bidang perbenihan, produksi dan perlindungan, adalah produktivitas kelapa masih rendah dan ketersediaan sarana produksi perkebunan, kurangnya pengetahuan petani dalam mengembangkan kan bibit unggul. Permasalahan yang terkait dengan bidang pengolahan dan pemasaran adalah masih kurangnya optimalisasi alat dan mesin pengolahan hasil dan penanganan pasca panen perkebunan oleh kelompok tani/kelompok usaha. Di sisi lain, pengawasan dan pembinaan terhadap operasionalisasi alat dan mesin pengolahan hasil dan penanganan pasca panen perkebunan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir masih belum maksimal.

Melihat situasi tersebut dibuat sebuah perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir yang nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir dalam upaya mewujudkan keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir, sesuai kewenangan dalam tugas dan fungsi Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir.

Didalam RENSTRA (Rencana Strategis ) Terdapat tujuan dan program yang akan dilaksanakan masing masing bidang dan bagian lingkungan Dinas

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Saifur Razi Kasim Riau





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana tertuang didalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Antara Lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerinrahan Daerah Kabutapten/Kota.
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian.
3. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian.
4. Program Penyuluhan Pertanian.

Dalam hal ini peneliti memfokuskan kepada Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian karena dalam pengimplementasian program tersebut peneliti bisa melakukan observasi lapangan bersama dengan panitia pelaksana program tersebut, yang dimana didalam program itu terdapat beberapa tujuan antara lain :

1. Pengawasan dan Pebyediaan Pupuk dan Pestisida Unggul
2. Optimalisasi Lahan Perkebunan Milik Petani
3. Penyediaan Alat dan Mesin untuk merawat perkebunan

Peneliti ingin melihat terkait dengan pengimplementasian kegiatan tersebut berjalan dengan lancar atau memiliki kendala kendala tertentu. elama 3 tahun terakhir luas lahan dan produksi kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir mengalami peningkatan produksi, hal tersebut dibuktikan dengan adanya data 3 tahun terakhir meningkatnya luas areal lahan dan produksi.

UIN SUSKA RIAU



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

**Tabel 1.3**  
**Produksi, Produktivitas Dan Jumlah Petani Pemilik Tanaman Tahunan**  
**Perkebunan Rakyat Kabupaten Indragiri Hilir**

Komoditi	Produksi (Kg)		
	2020	2021	2022
Kelapa Dalam	262,992,425	263,731,860	265,224,116
Kelapa Hibrida	50,367,795	51,155,742	52,667,751

Sumber : Data Terpilah Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir 2023

Jumlah produksi tidak mengalami peningkatan yang besar salah satunya karena luas Perkebunan Kelapa milik petani tidak sebanding dengan produktivitas kelapa yang ada. Hal ini disebabkan karena banyaknya tanaman kelapa milik petani yang sudah rusak. Kerusakan tanaman kelapa dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti perawatan yang kurang baik sehingga terserang OPT, terbatasnya sarana dan prasarana pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) dan masih terbatasnya tenaga Pengamat Organisme Pengganggu Tanaman (POPT), Terdegradasinya kemampuan lingkungan di dalam menahan laju intrusi (intrusi) airlaut, sehingga luas kebun yang rusak dan kritis semakin banyak, besarnya biaya untuk melakukan peremajaan dan masih rendahnya harga kelapa dan masih rendahnya tingkat kemampuan petani dalam melakukan perbaikan / pemeliharaan sarana, prasarana dan infrastruktur kebun.

Berangkat dari berbagai permasalahan pembangunan yang dihadapi, tantangan dan potensi pembangunan yang dapat dikembangkan, maka dirumuskan isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Indragiri Hilir melalui berbagai pertimbangan diantaranya memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian



saaran pembangunan nasional, merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat, memiliki daya ungkit terhadap pembangunan daerah, kemudahan untuk dikelola dan merupakan prioritas terhadap janji politik yang perlu diwujudkan.

### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang dan fokus masalah Implementasi program dinas perkebunan dalam meningkatkan kesejahteraan petani kelapa berdasarkan permasalahan yang akan diteliti, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

“Bagaimana Implementasi Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian untuk peningkatan kesejahteraan petani perkebunan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir?”

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis :

“Untuk mengetahui Implementasi Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian untuk peningkatan kesejahteraan petani perkebunan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir”

### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

#### Manfaat Teoritis

1 Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

informasi yang berguna di dalam pengambilan kebijakan straregi untuk meningkatkan kesejahteraan petani kelapa Kabupaten Indragiri Hilir

2. Penelitian ini diharapkan berguna sebagai suatu karya ilmiah yang dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan yang dapat mendukung bagi peneliti maupun pihak lain yang tertarik dalam bidang penelitian yang sama

**Manfaat Praktis**

1. Bagi Pemerintah Sebagai dasar pengambilan kebijakan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, bahan pertimbangan dan evaluasi terhadap penetapan kebijakan, terutama kaitannya strategi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani kelapa Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Bagi Peneliti Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan dan wawasan yang berkaitan dengan strategi pemasaran, sehingga wawasan dan pengetahuan tersebut dapat digunakan di masa yang akan datang.

**1.5 Sistematika Penelitian**

Agar memudahkan dalam pembahasan penelitian ini, penulis memberikan gambaran agar jelas terkait apa saja pembahasan disetiap bab melalui sistematik yang disusun melalui bab-bab susunan berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan bab pertama dari penulisan proposal, yang antara lain berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.



## **BAB II : LANDASAN TEORITIS**

Berisikan definisi, konsep, teori-teori, referensi yang bersumber dari buku, review, jurnal, publikasi yang relevan dengan masalah yang diteliti dan kajian- kajian terdahulu.

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Menguraikan tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, serta metode analisis.

## **BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Objek Penelitian Menguraikan tentang sejarah objek penelitian, aktivitas objek penelitian, dan struktur organisasi objek penelitian.

## **BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang diteliti.

## **BAB VI : PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB II****LANDASAN TEORI****2.1 Kebijakan Publik****2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik**

Kebijakan publik merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga negara. Ditinjau dari proses, kebijakan publik diartikan sebagai hasil dari adanya sinergi, kompromi atau bahkan kompetisi antara berbagai gagasan, teori, ideologi, dan kepentingan-kepentingan yang mewakili sistem politik suatu negara. Oleh karena itu, kebijakan merupakan instrumen pemerintah untuk melakukan suatu tindakan dalam bidang tertentu seperti fasilitas umum, transportasi, pendidikan, kesehatan, perumahan, kesejahteraan, dan lain-lain yang dianggap akan membawa dampak positif bagi kehidupan warganya.

Pengertian lainnya, kebijakan publik hanya sebatas dokumen-dokumen resmi seperti perundang-undangan, dan peraturan pemerintah. Namun sebagian lagi mengartikan kebijakan publik sebagai pedoman strategi dan kerangka tindakan yang dipilih atau ditetapkan sebagai garis besar pemerintah dalam melakukan kegiatan pembangunan (Bakry, 2010). Kebijakan publik memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya perlu untuk dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai alternatif penentuan langkah yang strategis untuk





© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Saarif Kasim Riau

melempai sasaran pembangunan. Dunn (2001: 35) mengemukakan bahwa analisis kebijakan publik merupakan sebuah disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode penelitian dan argumen untuk menghasilkan informasi yang relevan dengan kebijakan sehingga bisa dimanfaatkan dalam rangka memecahkan masalah yang terkait dengan implementasi kebijakan (Laka & Sasmito, 2019).

Dalam mewujudkan suatu produk kebijakan publik yang bernuansa kesejahteraan rakyat, masalahnya bukan hanya terletak pada kemauan politik nasional, tetapi juga pada pelaksanaan bertindak dari kemauan politik nasional tersebut. Hal ini penting, mengingat bangsa Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk/plural. Pengertian masyarakat majemuk secara horizontal ditandai adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan-perbedaan suku bangsa, agama, adat istiadat, serta perbedaan kedaerahan. Sedangkan secara vertikal ditandai oleh adanya perbedaan-perbedaan kesenjangan yang cukup tajam antara masyarakat lapisan atas dan masyarakat lapisan bawah (Suryono, 2018).

Pembuatan kebijakan publik harus dilakukan secara proporsional dengan menggunakan analisis dan metode yang benar sehingga dapat menghasilkan kebijakan publik yang benar-benar dapat bermanfaat. Untuk menghindari kebijakan publik yang justru kontra produktif dengan asas manfaat yang malah menghasilkan serangkaian masalah-masalah yang baru. Kita tidak dapat menafikan bahwa kebijakan publik tidak berada di ruang hampa karena dalam kebijakan publik terangkum kecenderungan-kecenderungan politis yang dimiliki oleh para aktor yang merumuskan sebuah kebijakan. Oleh karena itu sebagai

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sebuah fakta, kebijakan publik tidak hanya memiliki fakta strategis dengan menjawab permasalahan-permasalahan sosial yang dialami oleh masyarakat melainkan juga terdapat fakta politis dimana aktor-aktor yang memiliki andil dalam perumusan kebijakan publik juga memiliki kepentingan khusus untuk dirinya sendiri. Maka dari itu sebagai sebuah strategi, kebijakan publik tidak hanya memiliki sisi positif melainkan juga terdapat sisi negatif (Laka & Sasmito, 2019)

## 2.1.2 Implementasi Kebijakan Publik

Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier Menurut Mazmanian dan Sabatier (dalam Subarsono 2005) implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan- keputusan eksekutif atau keputusan badan Peradilan. ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni:

### 1. Karakteristik Dari Masalah

Pertama tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan. Di satu pihak ada beberapa masalah sosial secara teknis mudah dipecahkan, seperti kekurangan persediaan air minum bagi penduduk atau harga beras yang tiba-tiba naik. Di pihak lain terdapat masalah-masalah sosial yang relatif sulit dipecahkan, seperti kemiskinan, pengangguran, korupsi, dan sebagainya. Oleh karena itu, sifat masalah itu sendiri akan mempengaruhi mudah tidaknya suatu program yang diimplementasikan, jadi tingkat keberhasilan sebuah kebijakan tergantung pada masalah-masalah sosial yang ada jika, masalah sosial semakin besar maka tolak

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



ukuran keberhasilan semakin sulit tercapai karena persoalan yang tidak dapat dipecahkan oleh pemerintah. Sub indikator:

- a. Tingkat Kesulitan Teknis dari masalah yang ada
- b. Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran
- c. Presentase kelompok sasaran terhadap total populasi

## 2. Karakteristik Kebijakan/Undang-Undang

Karakteristik kebijakan adalah kejelasan isi kebijakan. Ini berarti semakin jelas dan rinci isi sebuah kebijakan akan mudah diimplementasikan karena implementor mudah memahami dan menerjemahkan dalam tindakan nyata. Sebaliknya, ketidakjelasan isi kebijakan merupakan potensi lahirnya distorsi dalam implementasi kebijakan. Jadi dalam karakteristik kebijakan berperan aktif bagaimana kejelasan kebijakan maka dapat memahami dengan mudah dan melaksanakan dengan mudah. Lalu seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis. Kebijakan yang memiliki dasar teoritis memiliki sifat lebih mantap karena sudah teruji, walaupun untuk beberapa lingkungan sosial tertentu perlu ada modifikasi. Jadi sebuah kebijakan harus memiliki dasar teoritis yang sudah teruji dengan baik dan menjadi dasar sebuah kebijakan. Sub indikator:

- a. Kejelasan Isi Kebijakan
- b. Seberapa jauh kebijakan memiliki dukungan teoritis
- c. Besarnya alokasi sumberdaya financial terhadap kebijakan tersebut
- d. Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana
- e. Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





- © Hak Cipta miliknya UIN Suska Riau
- f. Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan
- g. Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan

### 5. Variabel Lingkungan

Lingkungan kebijakan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi. Masyarakat yang sudah terbuka dan terdidik akan relatif mudah menerima program-program pembaharuan dibanding dengan masyarakat yang masih tertutup dan tradisional. Demikian juga, kemajuan teknologi akan membantu dalam proses keberhasilan implementasi program, karena program-program tersebut dapat disosialisasikan dan diimplementasikan dengan bantuan teknologi modern. Sub indikator:

- Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi
- Dukungan publik terhadap sebuah kebijakan
- Sikap dari kelompok pemilih
- Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor

Sumber: Teori Implementasi Kebijakan menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier Dalam (A.G Subarsono 2005)

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implimentasi kebijakan dari sudut pandang teori siklikal (cyclical theory) maka implementasi itu akan diperlukan sebagai suatu tahapan penting yang berlangsung dari proses kebijakan, terutama setelah wacana legal

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



formal, biasanya berupa undang-undang, peraturan, ketetapan, atau bentuk-bentuk produk lainnya, dianggap sudah usai. Dalam arti seluas-luasnya, implementasi juga sering dianggap sebagai bentuk pengoperasionalisasian atau penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang dan menjadi kesepakatan bersama diantara beragam pemangku kepentingan (stakeholders), aktor, organisasi (public atau privat), prosedur, dan teknik secara sinergistis yang digerakan untuk bekerjasama guna menerapkan kebijakan kearah tertentu yang dikehendaki.

Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa, “Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan faktor perhatian implementasi kebijakan, yaitu kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan publik yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian- kejadian”. Selain definisi semacam itu, implementasi kebijakan dapat pula dianggap suatu proses, keluaran (output) dan hasil akhir (outcome). Berangkat dari logika pemikiran ini, maka implementasi kebijakan dapat dikonseptualisasikan sebagai suatu proses, serangkaian keputusan (a serial of decisions) dan tindakan (actions) yang bertujuan melaksanakan keputusan pemerintah atau keputusan legislasi Negara yang telah dibuat atau dirumuskan sebelumnya.

Menurut Van Meter dsn Van Horn, 1975 dalam Leo Agustino (2006:139) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Sedangkan menurut Daniel Mazmanian dan Paul Sabater mendefinisikan bahwa implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.

## 2.2 Implementasi Program

Program dalam (Rosina Sinulingga, 2004) merupakan unsur pertama yang harus ada demi tercapainya kegiatan implementasi. Unsur kedua yang harus dipenuhi dalam proses implementasi program yaitu adanya kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program, sehingga masyarakat dilibatkan dan membawa hasil dari program yang dijalankan dan adanya perubahan dan peningkatan dalam kehidupannya. Tanpa memberikan manfaat kepada masyarakat maka dikatakan program tersebut telah gagal dilaksanakan. Berhasil atau tidaknya suatu program diimplementasikan tergantung dari unsur pelaksanaannya (eksekutif). Unsur pelaksanaan ini merupakan unsur ketiga. Pelaksanaan penting artinya karena pelaksanaan baik itu organisasi maupun perorangan bertanggungjawab dalam pengelolaan maupun pengawasan dalam proses implementasi. (Riggs, 2005:54).

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi program adalah tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat terhadap suatu objek atau sasaran yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui adanya organisasi, interpretasi dan penerapan. Gunakan mencapai tujuan impementasi program secara efektif, pemerintah harus melakukan aksi atau tindakan yang berupa penghimpunan sumber dana dan pengelolaan sumber daya alam dan manusia. Hasil yang diperoleh dari aksi pertama dapat disebut input kebijakan, sementara aksi yang kedua disebut sebagai proses implementasi kebijakan (Ratmiko, 2005:4). Untuk mengoperasionalkan implementasi program agar tercapainya suatu tujuan serta terpenuhinya misi program diperlukan kemampuan yang tinggi pada organisasi pelaksanaannya.

### 2.3 Evaluasi

Evaluasi adalah pengukuran dan perbaikan dalam kegiatan yang dilaksanakan, seperti membandingkan hasil-hasil kegiatan yang dibuat. Tujuannya agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dapat terselenggarakan. Dapat diartikan, evaluasi adalah suatu proses perbandingan dan pengukuran dari hasil akhir pekerjaan yang dinyatakan dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya dicapai. Beberapa pengertian evaluasi menurut para ahli: (Djaali & Muljono, 2008) pengertian evaluasi adalah proses memperhitungkan sesuatu yang berlandaskan kriteria atau tujuan yang sudah ditetapkan yang selanjutnya diiringi dengan pengambilan keputusan atas obyek yang dievaluasi. Menurut (Munthe, 2015) mengatakan bahwa: “evaluasi sebagai

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



riset untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi, menilainya dan membandingkannya dengan indikator evaluasi dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi”

#### 2.4 Rencana Strategis (RENSTRA)

Rencana strategis (strategic planning) dalam (Handoko, 2003) adalah proses pemilihan tujuan-tujuan organisasi; penentuan strategi, kebijaksanaan dan program program strategik yang diperlukan untuk tujuan-tujuan tersebut; dan penetapan metode-metode yang diperlukan untuk menjaga bahwa strategi dan kebijaksanaan telah diimplementasikan. Secara lebih ringkas perencanaan strategik merupakan proses perencanaan jangka panjang yang disusun dan digunakan untuk menentukan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi.

Kemudian Taylor dalam (Ramli, 2014) mengatakan bahwa perencanaan strategis dipandang sebagai metode untuk mengelola perubahan yang tidak dapat diindari sehingga dapat juga disebut sebagai metode untuk berurusan dengan kompleksitas lingkungan yang seringkali erat hubungannya dengan kepentingan organisasi. Akan tetapi ia juga suatu metode untuk mengambil kompleksitas lingkungan internal yang ditimbulkan oleh bermacam-macam kebutuhan oleh setiap unit kerja dalam organisasi. Sedemikian besar peran dari perencanaan strategis itu sehingga ia tidak dapat di delegasikan. Apabila terjadi pendelegasian dari eselon atas ke eselon bawah dan sekaligus menghilangkan partisipasi aktif mereka, maka tekanannya menjadi *planning proses* menjadi *plans book*.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perencanaan strategis memiliki manfaat yang besar bagi organisasi sektor publik agar lebih efektif dalam melakukan suatu tindakan. Dengan adanya sebuah perencanaan strategis maka organisasi dapat mempersiapkan tindakan-tindakan terbaik apa sajakah yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Pada tahun 2019 Kabupaten Indragiri Hilir telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023, yang kemudian diikuti dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Namun sebagai tindak lanjut dari hasil pengendalian dan evaluasi terhadap Dokumen RPJMD 2018-2023, serta untuk menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka kemudian dilakukan Perubahan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018- 2023 dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 Nomor 2).

Dengan demikian jelaslah bahwa perencanaan merupakan suatu fungsi yang sangat pokok dalam organisasi. Perencanaan sudah sangat sering dikatakan sebagai fungsi yang paling mendasar. Perencanaan selalu menyajikan penentuan tujuan organisasi dan yang disertai dengan cara meraih tujuan tersebut. Perencanaan senantiasa dijadikan sebagai dasar untuk menjalankan berbagai aktivitas organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Perencanaan mampu membuat setiap orang yang ada di dalam organisasi itu mengetahui dan memahami tentang apa yang ingin dicapai dan bagaimana cara mencapainya.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adanya perencanaan yang baik akan membuat semua aktivitas yang dilakukan menjadi terarah dengan baik pula. Jika semua aktivitas yang dilakukan sudah dijalankan sebagai mana mestinya maka keberhasilan mencapai tujuan sudah ada di depan mata. Jadi sudah jelaslah bahwa keberhasilan sebuah organisasi membuat perencanaan yang baik merupakan suatu usaha untuk mencapai keberhasilan organisasi secara keseluruhan. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa perencanaan mutlak harus ada dalam setiap organisasi (Rusniati & Haq, 2014)

Terkait Perubahan RPJMD tersebut, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 342 Ayat (4) mengamanatkan bahwa Perubahan RPJMD menjadi pedoman bagi RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan Perubahan Renstra Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023. Selain hal tersebut diatas, Perubahan Renstra Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir juga menyesuaikan nomenklatur terikini sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 Nomor 2).

Perubahan Renstra Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir ini nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir dalam upaya mewujudkan keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kabupaten Indragiri Hilir, sesuai kewenangan dalam tugas dan fungsi Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir (Perubahan Renstra 2018 - 2023 | Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir).

## 2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis.

1. Dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi Volume 5 Nomor 1 (2021) Atas Nama Reskika Sari yang berjudul Strategi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Menjaga Stabilitas Harga Guna Meningkatkan Kesejahteraan Petani Kelapa Dikecamatan Batang Tuaka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi yang digunakan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam menjaga stabilitas harga guna meningkatkan kesejahteraan petani kelapa khususnya Di Kecamatan Batang Tuaka dan juga untuk mengetahui apakah strategi tersebut berdampak pada kesejahteraan petani tersebut. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian menggunakan teori strategi (Analisis SWOT) dan teori kesejahteraan sosial menurut Midgkey. Hasil dari penelitian ini untuk menjaga stabilitas harga kelapa, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir



telah membuat strategi diantaranya adalah satu membuat sebuah regulasi, kedua melakukan penguatan terhadap petani kelapa dan yang ketiga atau terakhir divertifikasi produk olahan dari kelapa. Dampak dari strategi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir di Kecamatan Batang Tuaka jika dilihat tiga elemen utama kesejahteraan sosial menurut Midgley (kehidupan sosial masyarakat, pemenuhan kebutuhan masyarakat, dan pengembangan diri masyarakat) sudah berdampak pada kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Batang Tuaka namun memang belum signifikan karena beberapa faktor penghambat antara lain pengembangan divertifikasi produk kelapa belum maksimal, kurangnya perusahaan yang mengakibatkan harga kelapa belum bisa dibeli dengan harga mahal, monopoli perdagangan dan masih banyak tanaman rusak dan mati yang mengakibatkan produktivitas kelapa menurun.

2. Dalam Jurnal Ilmu Administrasi Publik Volume 5 No 1 Atas Nama Havidia Zein dengan judul Strategi Pemerintah Kota Sabulussalam dalam meningkatkan kesejahteraan petani . Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Strategi Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani Kota Sabulussalam berdasarkan kesepakatan bersama yang telah ditetapkan. Adapun hambatan dan kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Sabulussalam adalah masalah dalam anggaran yang terkadang tidak sesuai dengan yang diharapkan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.6 Defenisi Konseptual

Defenisi konseptual adalah unsur penelitian yang menjelaskan tentang karakteristik suatu masalah yang hendak diteliti. Berdasarkan landasan teori yang telah dipaparkan di atas, dapat dikemukakan defenisi konseptual dari masing-masing variable sebagai berikut :

1. Program adalah kumpulan-kumpulan instruksi dalam bentuk bahasa, kode skema, maupun bentuk lain, dimana apabila dijadikan satu dengan media yang bisa dibaca oleh computer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi khuss termasuk persiapan dalam merancang instruksi tersebut.
2. Kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
3. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan.
4. Kelapa adalah suatu jenis tumbuha dari suku aren-arenan atau Areceaceae. Tumbuhan ini memiliki manfaat yang banyak,hamper semua bagiannya dapat dimanfaatkan oleh manusia sehingga daianggap sebagai tumbuhan serba guna. Kelapa secara alami tumbuh didaerah pantai sampai pegunungan mencapai ketiggian 30 M.

## 2.7 Konsep Operasional

Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir guna peningkatan

kesejahteraan petani perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir , yang dilandaskan pada pada Renstra 2018 - 2023 Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir. Dalam Renstra tersebut terdapat program penyediaan dan pengembangan sarana. Akhirnya akan berakibat pada: Meningkatnya kesejahteraan petani perkebunan kelapa Kecamatan Gaung Desa Belantaraya Kabupaten Indragiri Hilir oleh Dinas Perkebunan.

Agar konsep dan data diteliti secara empiris, maka konsep tersebut harus dioperasionalisasikan dengan cara mengubahnya menjadi variable atau sesuatu yang mempunyai nilai. Penjelasan dari definisi operasional dari variable-variabel penelitian ini sebagai berikut :

**Tabel 2.2 Konsep Operasional**

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Implementasi Kebijakan Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sebatier	Karakteristik Dari Masalah	a. Tingkat Kesulitan Teknis dari masalah yang ada b. Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran c. Prosentase kelompok sasaran terhadap total populasi

<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p>		<p>bagai institusi pelaksana</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>e. Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana</li> <li>f. Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan</li> <li>g. Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan</li> </ul>
<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p>Karakteristik Kebijakan/Undang-Undang</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kejelasan Isi Kebijakan</li> <li>b. Seberapa jauh kebijakan memiliki dukungan teoritis</li> <li>c. Besarnya alokasi sumberdaya financial terhadap kebijakan tersebut</li> <li>d. Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar</li> </ul>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

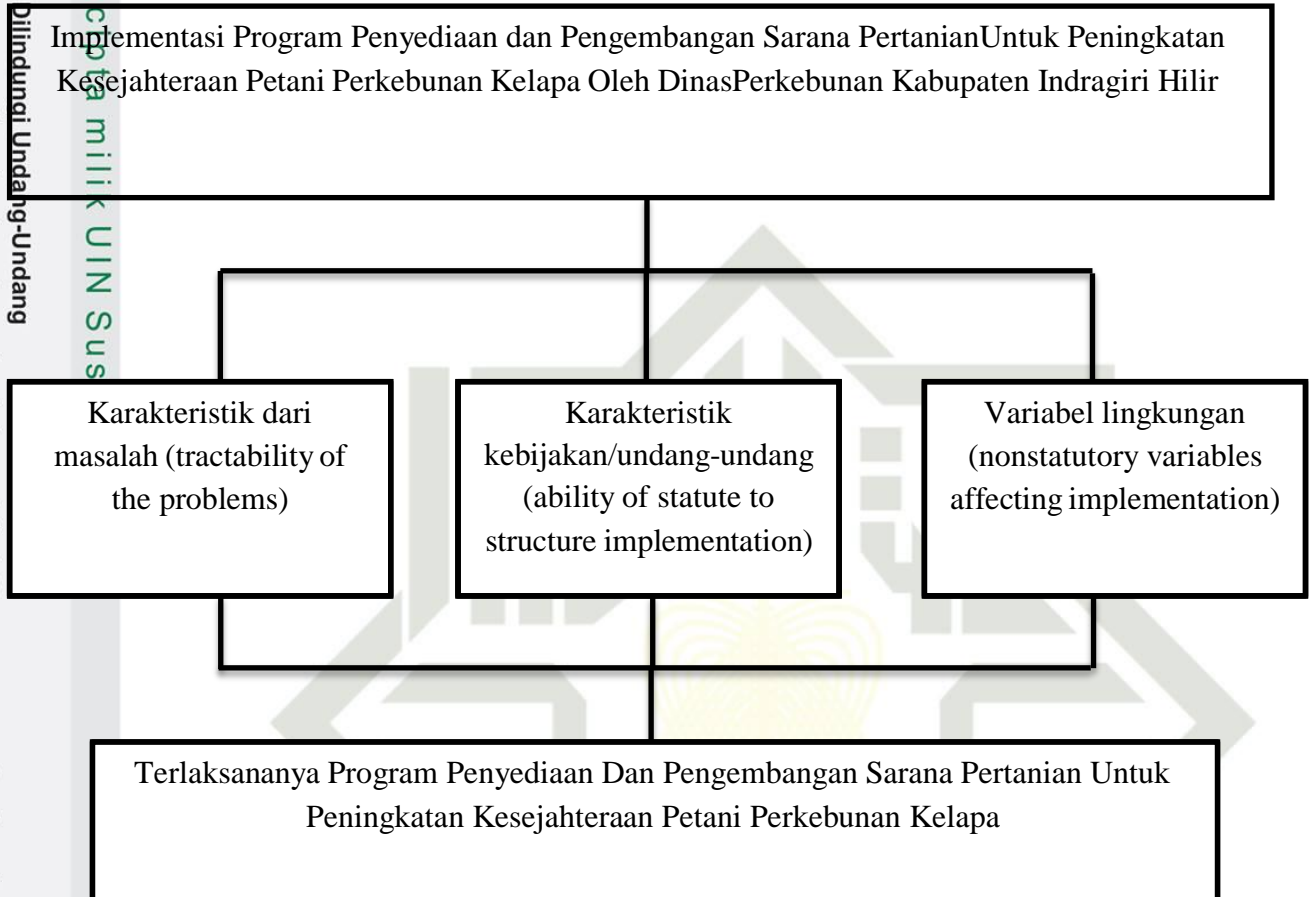
Variabel Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi</li> <li>b. Dukungan publik terhadap sebuah kebijakan</li> <li>c. Sikap dari kelompok pemilih (constituency groups)</li> <li>d. Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor</li> </ol>
---------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber : *Teori Implementasi Kebijakan menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier Dalam (A.G Subarsono 2005)*

## 2.8 Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir penelitian akan memberikan arah yang dapat dijadikan pedoman bagi para peneliti dalam melaksanakan penelitiannya. Kerangka berfikir ini bertujuan untuk memberikan gambaran lebih jelas tentang variable penelitian dan indikator-indikator yang menentukannya. Adapaun kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat dilihat dalam skema berikut ini :

**Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan pendekatan yang bersifat kualitatif dan merupakan penelitian lapangan. Selanjutnya menurut Sukmadinata mendefinisikan bahwa metodologi kualitatif adalah konstruktivisme yang berasumsi bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaksi dan suatu pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh setiap individu. Penelitian kualitatif percaya bahwa kebenaran adalah dinamis dan dapat ditemukan hanya melalui penelaahan terhadap orang-orang melalui interaksinya dengan situasi sosial mereka. Karakteristik penelitian kualitatif yaitu:

- a. Menggunakan lingkungan alamiah sebagai data sumber data peristiwa-peristiwa yang telah terjadi dalam situasi sosial merupakan kajian utama penelitian kualitatif. Peneliti pergi ke lokasi tersebut memahami dan mempelajari situasi, studi dilakukan pada saat interaksi berlangsung di tempat kejadian. Peneliti mengamati, mencatat dan bertanya.
- b. Memiliki sifat deskriptif analitik. Data yang diperoleh sebagai hasil pengamatan, hasil wawancara, hasil pemotretan, analisis dokumen, catatan lapangan, tidak dituangkan dalam bentuk dan angka-angka.
- c. Tekanan pada proses bukan hasil. Data informasi yang diperlukan berkenaan dengan pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana untuk mengungkap proses bukan hasil suatu kegiatan.
- d. Bersifat Induktif. Penelitian kualitatif tidak dimulai dari deduksi teori, tetapi





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dimulai dari lapangan yakni fakta empiris. Peneliti terjun ke lapangan, mempelajari suatu proses atau penemuan yang terjadi secara alami, mencatat, menganalisis, menafsirkan dan melaporkan serta menarik kesimpulan-kesimpulan dari proses tersebut.

### 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan dengan cara terjun langsung ke objek penelitian usaha tanam kelapa muda di Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir. Waktu penelitian dilaksanakan pada 20 Februari s/d Oktober 2023

### 3.3 Jenis dan Sumber Data

#### 3.3.1 Jenis Data

Jenis penelitian pada penelitian ini meninakan metode deskriptif kualitatif, dimana dapat disimpulkan sebagai sebuah metode yang bertujuan untuk melukiskan atau menggambarkan keadaan dilapangan secara sistematis dengan fakta-fakta interpretasi yang tepat dan data yang saling berhubungan, serta bukan hanya untuk mencari kebenaran mutlak tetapi pada haakekatnya mencari pemahaman observasi.

Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan adalah kualitatif. Artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka melainkan data tersebut berasal dari observasi, naskah wawancara, catatan dan dokumen resmi lainnya. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empiris dibalik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 Sateislamic University of Sultan Saif Kasim Riau

### 3.3.2 Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam menyusun skripsi ini, penulis menggunakan dua metode yaitu:

#### Sumber Data Primer

Menurut Sugiyono (2020:193) data primer merupakan Sumber data primer atau sumber data utama adalah sumber data yang didapat secara langsung oleh pengumpul tanpa melalui perantara. Dalam hal ini peneliti mendapatkan data secara langsung baik secara individu maupun kelompok, lisan maupun tulis. Data Sekunder, data penelitian yang diperoleh yaitu sumber secara tidak langsung melalui media perantara.

#### Sumber Data Sekunder

Menurut Moleong (2005: 159) data sekunder merupakan data tambahan yang berupa buku, majalah, Tabloid, arsip, atau dokumen pribadi yang tidak secara langsung diperoleh dari sumbernya, dapat berupa teori, pengembangan, dan hipotesis yang ditulis oleh orang lain yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Meskipun bukan data utama, data sekunder tidak dapat diabaikan karena data sekunder merupakan data pendukung yang berfungsi 40 saling melengkapi data primer.

### 3.4 Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan orang atau pihak yang berkaitan dengan penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai berbagai kondisi yang ada di lokasi penelitian sehingga dapat memberikan data yang akurat kepada peneliti. Informan pada penelitian ini. Menurut Bagong Suyanto (2005:172) informan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian meliputi beberapa macam yaitu:

1. Informan Kunci (Key Informan) merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian.
2. Informan Utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti.
3. Informan Tambahan merupakan mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak secara langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.
4. Menurut Koentjaraningrat (1986) dalam Gunawan Imam (2015:166) Informan pertama yang ditunjuk karena memang benar-benar ahli atau yang memiliki pengetahuan tentang unsur masyarakat atau kebudayaan yang diperlukan itu disebut informan kunci (key informan).

Dalam menetapkan informan, peneliti menggunakan teknik purposive.

Menurut Sugiyono (2017) purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Dalam penelitian ini peneliti dalam menentukan informan kunci sesuai dengan kriteria dalam penetapan informan kunci yaitu seseorang yang mengetahui 46 seluk beluk dan dapat memberikan informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian.

Informan dalam penelitian ini yakni seseorang yang bias memberikan informasi tentang keadaan dan situasi terkait dengan rencana strategis Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir. Adapun informan pada penelitian ini adalah Kepala Dinas, Bidang Prasarana dan Sarana, Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan, dan Petani kelapa di Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir



**Tabel 3.1**  
**Informan Penelitian**

No.	Nama	Jumlah
1.	Kepala Dinas Perkebunan	1 Orang
2.	Sekretaris	1 Orang
3.	Kepala Sub Bagian Alat dan Mesin Pertanian	1 Orang
4.	Masyarakat	4 Orang

Sumber : Olahan Peneliti, 2023

### 3.2 Metode Pengumpulan Data

Tahap berikutnya adalah metode pengumpulan data yang merupakan cara untuk memperoleh tujuan. Cara pertama ini digunakan setelah peneliti memperhitungkan kemajuana ditinjau dari tujuan serta situasi penelitian. Sedangkan untuk mengelola data yang baik dan akurat dipergunakan beberapa metode, yaitu:

#### 1. Pengamatan (Observation),

Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara untuk mengumpulkan data dengan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Metode ini digunakan sebagai langkah awal dengan melihat secara langsung obyek penelitian guna mendapatkan data yang diperoleh. Data tersebut antara lain berupa data tentang kondisi usaha kelapa di di Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir berfokus pada tingkat kesejahteraan petani.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Wawancara

Teknik ini dilakukan dengan memperoleh data dan informasi langsung dari responden mengenai permasalahan yang dikaji melalui wawancara. Metode wawancara ini digunakan untuk mengetahui hubungan dengan sumber data, melalui tanya jawab guna mendapatkan informasi yang diperlukan. Interview ini dilakukan mendalam tetapi bersifat luwes, susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat wawancara mengenai strategi pemasaran yang dilakukan oleh para petani terhadap usaha kelapa dalam bentuk di Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan.

Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian. Dimaksudkan yaitu untuk memperoleh data tertulis dari masyarakat di Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir sebagai sasaran objek penelitian. struktur organisasi dan data- data (dokumen) tentang pemasaran kopra yang diharapkan dapat menjadi acuan dalam menganalisa permasalahan dalam penelitian ini.



### 3.5 Teknik Analisis Data

Data Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa data telah didapatkan di lapangan kemudian diolah sesuai keperluan dari penelitian baik tabulasi ataupun diberi kode sesuai kebutuhan. Data yang didapatkan dari observasi disiapkan untuk menganalisis dari data terkumpul melalui wawancara dan data yang didapatkan dari wawancara diolah untuk menambah bahan dari paparan hasil penelitian.

Menurut Miles & Huberman (1992: 16) analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

#### 2. Penyajian Data

Miles & Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

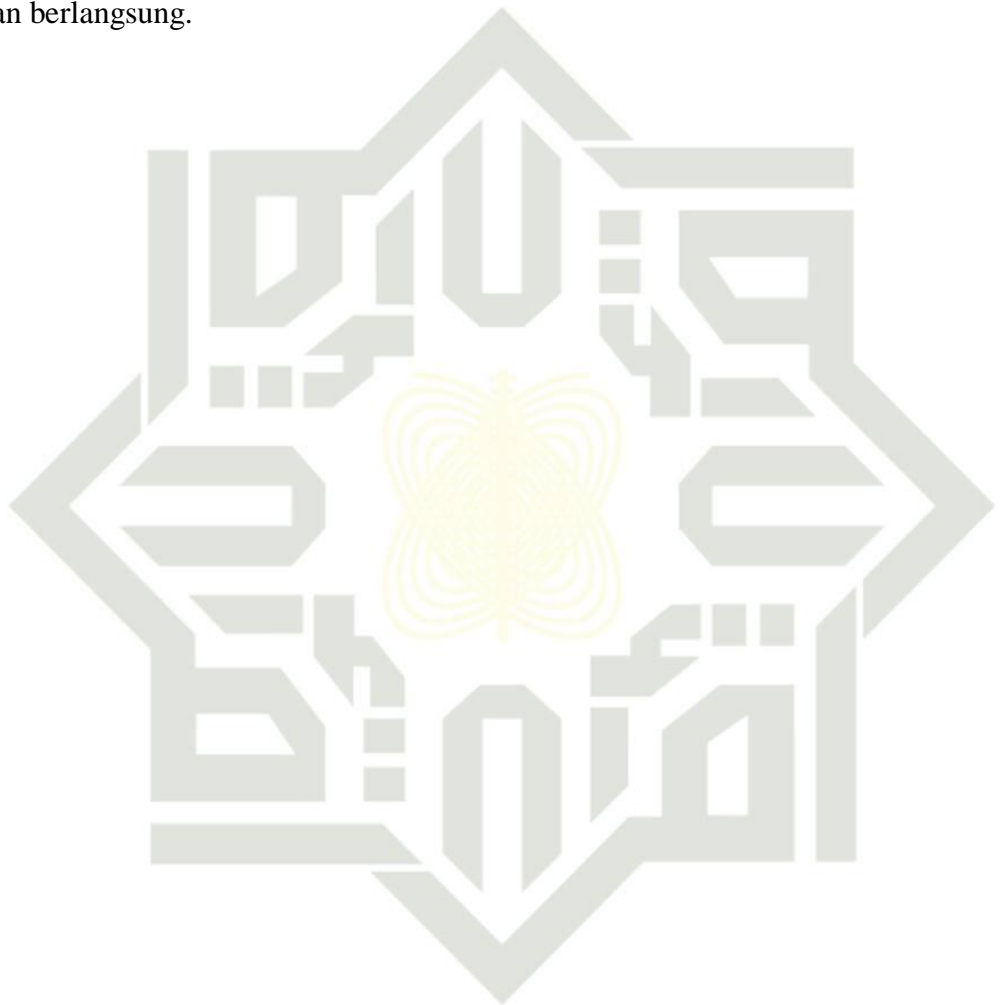
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan.

### 3. Menarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan menurut Miles & Huberman hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung.



UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB IV**

**GAMBARAN UMUM PENELITIAN**

**4.1 Gambaran Umum Dinas Perkebunan**

**4.1.1 Pengertian Dinas Perkebunan**

Gambaran umum Pelayanan Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir dilihat dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, untuk mencapai target dan kinerja yang dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir yang mengaju pada RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir. Kabupaten Indragiri Hilir secara geografis terletak di bagian selatan Provinsi Riau. Mata pencarian utama penduduk di Kabupaten Indragiri Hilir adalah berkebun kelapa. Sejarah mencatat bahwa tanaman kelapa telah lama dibudidayakan oleh masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir. Setelah kedatangan Tuan Guru Syekh Abdurrahman Shiddiq al Banjari, Mufti Kerajaan Indragiri, beliau memelopori pembuatan parit (kanal air) yang terkenal dengan nama Parit Hiayat. Secara teknis pembuatan parit sangat tepat diterapkan dalam budidaya tanaman perkebunan di lahan gambut.

Adapun nama-nama pimpinan pertama sampai sekarang Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir:

- Suparto Broto
- Sopyan Arahab
- Samli Walid

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

- Haban
- Syafrinal Haidi
- E. H. Kuswari, MP
- Drs. H. Mukhtar T, MM
- Drs. Tantawi Jauhari, MM
- Drs. H. Eddwan Shasby, MM
- Drs. H. Sirajuddin, MM

**4.2 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir**

**4.2.1 Dinas Perkebunan**

**Pasal 8**

- (1) Dinas Perkebunan menyelenggarakan tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian lingkup bidang perkebunan yang menjadi kewenangan daerah
- (2) Dinas Perkebunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan dan perumusan kebijakan Kesekretariatan, Bidang Prarana dan Sarana, Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan, Bidang Pengolahan dan Pemasaran, serta Bidang Penyuluhan;
  - b. pelaksanaan kebijakan Kesekretariatan, Bidang Pariwisata, Bidang Prarana dan Sarana, Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan, Bidang Pengolahan dan Pemasaran, serta Bidang Penyuluhan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Kesekretariatan, Bidang Prarana dan Sarana, Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan, Bidang Pengolahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





dan Pemasaran, serta Bidang Penyuluhan;

- d. pelaksanaan administrasi pada Kesekretariatan, Bidang Prarana dan Sarana, Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan, Bidang Pengolahan dan Pemasaran, serta Bidang Penyuluhan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **Sekretariat Pasal 9**

- (1) Sekretariat menyelenggarakan tugas pelayanan administrasi terkait perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta umum dan kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pelayanan administrasi dalam pengkajian, penyusunan dan pengusulan Rencana Strategis, Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, dan Laporan Kinerja Pemerintah pada Dinas Perkebunan;
- b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta umum dan kepegawaian;
- c. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pelayanan administrasi, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta umum dan kepegawaian
- d. pelaksanaan pemantuan, evaluasi dan pelaporan terkait perencanaan program,

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta umum dan kepegawaian;

- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas terkait perencanaan, evaluasi dan pelaporan, keuangandan perlengkapan, Sekretaris dibantu oleh Kelompok JF.

### Subbagian Umum dan Kepegawaian

#### Pasal 10

Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:

- a. penyusunan, perumusan dan pembagian tugas jabatan Pelaksana serta uraian tugas jabatan dan uraian kegiatan Kelompok JF pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. perencanaan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pelayanan umum dan kepegawaian;
- d. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan pada Dinas Perkebunan;
- e. pelaksanaan dan pengaturan fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta kegiatankeprotokolan;
- f. pengumpulan, penyusunan dan pengolahan bahan data informasi untuk kepentingan masyarakat;
- g. pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana kantor pada Dinas Perkebunan;
- h. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan,



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- keindahan, keamanan dan ketertiban kantor pada Dinas Perkebunan
- i. pelaksanaan koordinasi dan pelayanan administrasi kepegawaian; antara lain karpeg, karis/karsu, kartu askes/BPJS, taspen, pemberian penghargaan dan cinderamata, administrasi pernikahan dan perceraian pegawai, daftar hadir pegawai, surat izin cuti, surat perintah tugas, pelantikan pejabat, Penilaian Kinerja Pegawai, hukuman disiplin pegawai, kenaikan gaji berkala, validasi dan pemutakhiran data kepegawaian, penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan; pensiun pegawai dan urusan kepegawaian lainnya
  - j. pelaksanaan pengelolaan kearsipan antara lain melakukan pencatatan, pendistribusian, pendokumentasian dan pemeliharaan arsip;
  - k. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas pada Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugasnya.

**Bidang Prasarana dan Sarana**

**Pasal 11**

- (1) Bidang Prasarana dan Sarana menyelenggarakan tugas yang terkait dengan lahan dan irigasi, pupuk, pestisida dan alsintan, pembiayaan dan investasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Prasarana dan Sarana menyelenggarakan fungsi:





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Prasarana dan Sarana;
  - b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur lingkup Bidang Prasarana dan Sarana
  - c. pelaksanaan kebijakan di Bidang Prasarana dan Sarana, antara lain meliputi lahan dan irigasi, pupuk, pestisida dan alsintan, pembiayaan dan investasi;
  - d. pelaksanaan koordinasi perumusan dan penyusunan kebijakan prasarana dan sarana dengan Sekretariat Daerah dan/atau Perangkat Daerah terkait;
  - e. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan lingkup Bidang Prasarana dan Sarana; dan
  - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Prasarana dan Sarana dibantu oleh Kelompok JF.

### **Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan**

#### **Pasal 12**

- (1) Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan menyelenggarakan tugas yang terkait dengan perbenihan, produksi, dan perlindungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Perbenihan, Produksi dan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Perlindungan;
- b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur lingkup Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan;
  - c. pelaksanaan kebijakan di Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan, antara lain meliputi perbenihan, produksi, dan perlindungan;
  - d. pelaksanaan koordinasi perumusan dan penyusunan kebijakan perbenihan, produksi dan perlindungan dengan Sekretariat Daerah dan/atau Perangkat Daerah terkait;
  - e. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan lingkup Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan; dan
  - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan dibantu oleh Kelompok JF.

#### 4.3 Visi Dan Misi Dinas Perkebunan

##### Visi

Terdapatnya Agribisnis Perkebunan yang Produktif, Efisien, Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

##### Misi

- a. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya perkebunan secara produktif, efektif dan efisien untuk menjamin ketersediaan produk perkebunan dan

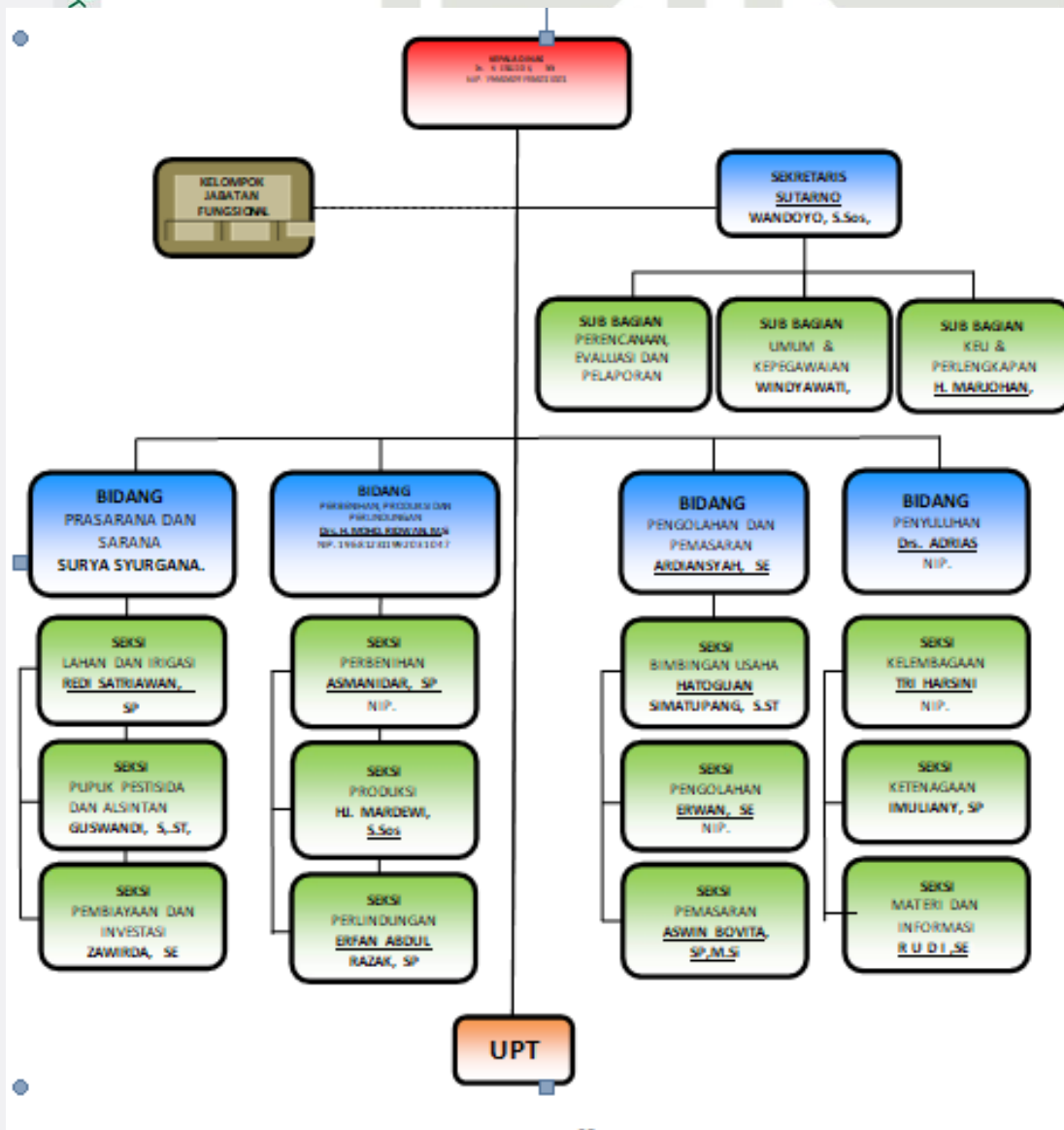
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. kelestarian lingkungan hidup.
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia perkebunan dalam rangka menghasilkan produk perkebunan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi.

#### 4.4 Struktur Organisasi Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir

Gambar 4.1  
Struktur Organisasi Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir







Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya mengenai Implementasi Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani Kelapa Oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan uraian hasil penelitian berupa wawancara, studi dokumentasi, dan observasi yang peneliti lakukan mengenai pengimplementasian Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana melalui Teori Implementasi Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Tujuan pengimplementasian Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian belum tercapai sepenuhnya secara angka. Namun tidak dapat dipungkiri dampak program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian bagi petani kelapa sudah cukup terasa dan membawa dampak positif bagi masyarakat Indragiri Hilir. Dalam proses pengimplementasian program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian untuk petani kelapa di Indragiri Hilir masuk dalam kategori permasalahan yang mudah untuk diselesaikan. Hal ini dapat digambarkan melalui kategori: Kemiskinan.
2. Dengan meningkatnya produktivitas kelapa maka ekonomi petani akan meningkat juga dan angka kemiskinan bagi petani kelapa akan menurun. Dapat dijelaskan program penyediaan dan pengembangan sarana oleh



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dinas Perkebunan Indragiri Hilir terealisasi dengan baik yang mana dapat ditunjukkan dengan berkurangnya angka kemiskinan di Indragiri Hilir.

3. Dalam hal ini proses pengimplementasian program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian untuk petani di Kabupaten Indragiri Hilir memiliki kebijakan yang jelas dan terukur dalam Program dalam Renstra Perubahan Dinas Perkebunan 2018 - 2023 terdapat pada Permendagri 13 tahun 2006 sesuai visi dan misi RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perkebunan. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per OPD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Perkebunan.

4. Dalam mendukung pengimplementasian suatu kebijakan adalah masalah keuangan/modal. Sumber dana berasal dari Pemerintah Daerah, diteruskan melalui Rencana Strategi dengan jumlah Rp. 45.000.000.00 per kecamatan, setiap kecamatan ada 5 desa, jadi pengimplementasian program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian untuk petani bisa terlaksana dengan maksimal.

5. Salah satu faktor utama kesuksesan implementasi sebuah kebijakan adalah adanya komitmen yang kuat dari aparatur dalam melaksanakan tugasnya. Komitmen mencakup keseriusan dan kesungguhan agar penerapan suatu

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peraturan ataupun kebijakan bisa berjalan dengan baik dan diterima serta dipatuhi oleh sasaran dari kebijakan tersebut: Komitmen dari Dinas Perkebunan, Dukungan Publik Terhadap Sebuah Kebijakan, Tingkat Komitmen dan Keterampilan dari Aparat dan Rencana Strategis (RENSTRA)

Perencanaan strategis memiliki manfaat yang besar bagi organisasi sektor publik agar lebih efektif dalam melakukan suatu tindakan. Dengan adanya sebuah perencanaan strategis maka organisasi dapat mempersiapkan tindakan-tindakan terbaik apa sajakah yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Pada tahun 2019 Kabupaten Indragiri Hilir telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023, yang kemudian diikuti dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

Terkait Perubahan RPJMD tersebut, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 342 Ayat (4) mengamanatkan bahwa Perubahan RPJMD menjadi pedoman bagi RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan Perubahan Renstra Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023. Perubahan Renstra Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir ini nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir dalam upaya mewujudkan keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir, sesuai kewenangan dalam tugas dan fungsi Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir (Perubahan Renstra 2018 - 2023).





## 6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas beberapa hal penulis sarankan dan semoga dapat bermanfaat dan bisa menjadi bahan evaluasi untuk kita semua tanpa terkecuali, kemudian saran yang dapat penulis berikan adalah :

1. Peneliti mengharapkan Pelaksanaan Program Penyediaan dan Pengembangan sarana pertanian di bidang sarana dan prasarana perkebunan yang ditangani Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir meliputi yang aspek pengelolaan lahan dan air, aspek Pembiayaan dan Investasi dan aspek sarana dan alat mesin perkebunan Seluruh pembangunan di bidang Prasarana dan sarana itu dilaksanakan dengan baik agar teknologi perkebunan tepat guna sehingga dapat mensejahterakan para petani perkebunan yang ada di Kabupaten Indragiri Hlir.
2. Peneliti berharap agar penerima Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana yaitu Kelompok Tani agar menggunakan bantuan yang diberikan dengan arif dan bijaksana sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah diatur agar masyarakat lebih berkembang dan sejahtera.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alah, H. G., & Suryana, Y. 2021. Manajemen Strategik Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 6(1), 87–94. <https://doi.org/10.15575/isema.v6i1.11037>
- Affandy, M. R. 2015. Perencanaan Strategi Pemasaran Perhiasan Imitasi Dengan Metode Analisis SWOT dan Analytical Hierarchy Procces (Studi Kasus : UD AQILA). *Jurnal Matrix*, 18(1), 7–35. <https://doi.org/doi : 10.30587/matrik.v18i1.xxx>
- Anggrain, D. M. 2019. Upaya Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Kelapa Kabupaten Indragri Hilir, Provinsi Riau 2016- 2019. *Jurnal Fisip*, 8(5), 55.
- Ansori. 2015. Sistem Perencanaan Strategis. *Jurnal Keilmuan Dan Pendidikan*, 3(1), 49–58.
- Ariana, R. 2016. Negara Dan Petani (Studi Kasus Pemihakan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Terhadap Petani Kelapa). *Jurnal Fisip*, 2(1), 1–23.
- Azizah, N. 2020. Analisis Tingkat Kesejahteraan Petani Pinang di Kecamatan Reth Kabupaten Indragiri Hilir. *Skripsi*. Pekanbaru: Universitas Islam Riau
- Bakry, A. 2010. Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik. *Jurnal MEDTEK*, 2(1), 12.
- Christian, A. J. 2020. Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Guna Penguatan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umk) Yang Terdampak Pandemi Coronavirus Disease (Covid-19). *Skripsi*. Bandung: Universitas Komputer Indonesia
- Handoko, T. H. 2003. Implementasi Penyusunan Rencana Strategis. *Skripsi*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan
- Ikhsan, I. B. W. 2016. Pertanian Berkelanjutan Melalui Pengelolaan Limbah dan Pengolahan Pasca Panen. *Jurnal Bakti Saraswati*, 05(02), 34.
- Laka, Y. H., & Sasmito, C. 2019. Manajemen Strategi Kebijakan Publik Sektor



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Pariwisata Di Desa Pujon Kidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang Jawa
- Tinjauan Pada Era Industri 4.0. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi*, 7(1), 28. <https://doi.org/10.33366/ref.v7i1.1347>
- Mandir, A. 2016. Strategi Pemasaran Jasa Pendidikan Madrasah. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 7(1), 27–40.
- Munthe, A. P. (2015). Pentingnya Evaluasi Program di Institusi Pendidikan: Sebuah Pengantar, Pengertian, Tujuan dan Manfaat. *Scholaria : Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 5(2), 1. <https://doi.org/10.24246/j.scholaria.2015.v5.i2.p1-14>
- Noviarni, Z. S. (2022). Implementasi Program Mengenai Pendirian Minang Mart Sebagai Upaya Pemerintah Daerah Memberdayakan Pedagang Tradisional Di Kota Padang. *14*(1), 385–395.
- Perdana, K. W. (2018). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bantul. *Program Studi Akuntansi. Universitas Muhammadiyah. Yogyakarta*.
- Rahman, Guntur, H. M. (2015). Implementasi Kebijakan Pemerintah Desa (Studi Di Desa Babana Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah). *Prodi P.ADP FF UNY, 00*, 1–16.
- Rahim, H. A. R. 2004. *Manajemen Strategi*. Makassar: Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan Makassar
- Ranli, H. M. 2014. *Manajemen Stratejik Sektor Publik*. Makassar: Alaudiin Press
- Riswanto, A. 2019. Strategi Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Karet Di Kecamatan Batin Xxiv Kabupaten Batang Hari. *Skripsi*. Jambi
- Universitas Islam Negri Jambi
- Rusniati, & Haq, A. 2014. Perencanaan strategis dalam perspektif organisasi. *Jurnal Intekna*, 14(2), 102–209.
- Ryan, Cooper, & Tauer. 2013. Strategi Branding Pemerintah Desa Biting Dalam





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengembangkan Potensi Wisata Di Desa Biting. *Skripsi*. Ponorogo: Universitas Muhammadiyah

Saifultra, W. 2022. Strategi Pengembangan Pemasaran Kelapa Dalam (Cocos Nucifera Lin) Di Desa Igal Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. *Skripsi*. Pekanbaru: Universitas Islam Riau

Sari, R. 2021. Strategi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Menjaga Stabilitas Harga Guna Meningkatkan Kesejahteraan Petani Kelapa Di Kecamatan Batang Tuaka. *Jurnal Jisip-Unja*, 5(1), 52–63.

Siregar, R. A. 2020. Penanganan Pembiayaan Bermasalah Mikro 75ib Di Bank BRI Syariah Kcp Rantau Prapat. *Jurnal Informasi Kimia Dan Pemodelan*, 53(9), 1689–1699.

Sonatasia, D., Onsardi, & Arini, E. 2020. Strategi Meningkatkan Loyalitas Konsumen Makanan Khas Kota Curup Kabupaten Rejang Lebong. *Jurnal Informasi Dan Pemodelan Kimia*, 53(9), 1689–1699.

Sulistyowati. Lies. dkk. 2019. Analisis Tingkat Kesejahteraan Petani Kedelai Dengan Menggunakan Pendekatan Nilai Tukar Petani (Ntp) Dan Nilai Tukar Pendapatan Rumah Tangga Petani (Ntprp). *Jurnal Agribisnis Terpadu*, 12(2), 178. <https://doi.org/10.33512/jat.v12i2.6779>

Suryono, A. 2018. Kebijakan Publik Untuk Kesejahteraan Rakyat. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 6(2), 98–102. <https://doi.org/10.31334/trans.v6i2.33>

## LAMPIRAN

### Wawancara Peneliti Bersama Kepala Pengawas Alat Dan Mesin Pertanian Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir



Imber:

- Hak Cipta Dilindungi Ur**
1. Dilarang mengutip s
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## LAMPIRAN

### PANDUAN WAWANCARA

#### Implementasi Kebijakan menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A.

##### Sabatier

1. Karakteristik dari masalah (Tractability of the problems)
  - a. Menurut bapak/Ibu apa problem (masalah) yang terjadi sebelumnya sehingga menyebabkan keluarnya kebijakan penyediaan dan pengembangan sarana pertanian?
  - b. Apa yang menjadi pertimbangan awal terbitnya kebijakan penyediaan dan pengembangan sarana pertanian?
  - c. Apakah kebijakan tersebut langsung diimplementasikan setelah adanya kebijakan tersebut?
  - d. Apakah setelah kebijakan tersebut di implementasikan banyak petani- petani yang merasa terbantu oleh kebijakan tersebut?
  - e. Siapa saja stakeholder yang terlibat dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut?
  - f. Menurut bapak/ibu apakah tujuan dari kebijakan tersebut sudah tercapai sesuai dengan apa yang di harapkan?
  - g. Bagaimana perubahan perilaku dari kelompok sasaran yang diharapkan apakah sudah sesuai dengan kebijakan yang ada?
2. Karakteristik kebijakan/undang-undang (Ability of statute to structure implementation)
  - a. Menurut bapak/ibu apakah didalam kebijakan mengenai kebijakantersebut sudah cukup jelas aturan-aturan nya misalnya mengenai biaya dari biaya penyediaan dan pengembangan sarana pertanian tersebut ditanggung siapa?

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Bagaimana cara para stakeholder untuk mensosialisasikan kebijakan tersebut kepada mereka para petani kelapa?
- Apakah akses mereka para petani untuk ikut berpartisipasi dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut juga di dukung?
- Seberapa besar dukungan dari para stakeholder untuk melaksanakan kebijakan tersebut?
- Apakah pihak petani menerima dengan baik kebijakan penyediaan dan pengembangan sarana pertanian di Kabupaten Indragiri Hilir?
- f. Apakah selama ini ada terjadi hambatan bagi pelaksana dalam penyediaan dan pengembangan sarana pertanian ?
3. Variabel lingkungan (Nonstatutory variables affecting implementation).
- a. Bagaimana respon dari sasaran kebijakan tersebut (Petani) atau bahkan respon dari masyarakat sekitar?
  - b. Apakah ada kendala yang terjadi ketika mengimplementasikan kebijakan tersebut ?
  - c. Bagaimana komitmen mereka para petani tersebut dalam mengimplementasikannya?
  - d. Sejauh ini apakah ada terjadi kendala dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut?
  - e. Bagaimana perasaan petani ketika sudah adanya program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian tersebut?



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
 كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية  
 FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES  
 Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
 Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/3052/2023  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : -  
 Perihal : Bimbingan Skripsi

Pekanbaru, 30 Mei 2023 M  
 10 Zulqaidah 1444 H

Kepada  
 Yth. **Irdayanti, S.IP, MA**  
 Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.  
 Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : MUHAMMAD OLIF PASHA  
 NIM : 11970514739  
 Jurusan : Administrasi Negara  
 Semester : VIII (Delapan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "**IMPLEMENTASI PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN UNTUK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI PERKEBUNAN KELAPA OLEH DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR (Studi Kasus Petani Perkebunan Kelapa Kecamatan Gaung Desa Belantaraya Kabupaten Indragiri Hilir)**". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas. Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan  
 Wakil Dekan Bid. Akademik dan  
 Pengembangan Lembaga,



**Dr. Kamarudin, S.Sos, M. Si**  
 NIM. 07901612007101003

Tembusan :  
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau





UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuahmadani Tampan, Pekanbaru 28298 PO.Box. 1004 Telp. 0761-562051  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-2864/Un.04/F.VII/PP.00.9/5/2023 Pekanbaru, 15 Mei 2023 M  
Sifat : Biasa 24 Syawwal 1444 H  
Lampiran : -  
Hal : **Izin Riset**

Kepada  
Yth. Kepala Kantor  
Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu pintu  
Provinsi Riau  
Di Tempat


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas  
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Muhammad Olif Pasha  
NIM. : 11970514739  
Jurusan : Administrasi Negara  
Semester : VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan **Riset** dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:  
"**Strategi Peningkatan Kesejahteraan Petani Perkebunan Kelapa Kecamatan  
Pelangiran oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir**". Untuk itu kami  
mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada  
mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,  
  
Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM  
NIP. 19700826 199903 2 001





**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISSET/56914  
TENTANG



1.04.02.01

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISSET/PRA RISSET DAN  
PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : B-2988/Un.04/F.IV/PP.00.9/05/2023 Tanggal 25 Mei 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : **MUHAMMAD OLIF PASHA**
2. NIM / KTP : **11970514739**
3. Program Studi : **ADMINISTRASI NEGARA**
4. Jenjang : **S1**
5. Alamat : **PEKANBARU**
6. Judul Penelitian : **IMPLEMENTASI PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN UNTUK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI PERKEBUNAN KELAPA OLEH DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**
7. Lokasi Penelitian : **DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 12 Juni 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI RIAU**

**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Indragiri Hilir  
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Tembilahan
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



## RIWAYAT HIDUP PENULIS

Muhammad Olif Pasha, Lahir di Tembilahan pada tanggal 20 Januari 2001. Penulis merupakan anak pertama dari 2 (Dua) saudara, lahir dari pasangan Ayahanda Robinsyah dan Ibunda Yusnita. Tahun 2006 memulai Pendidikan di Taman Kanak-Kanak An-Nur di Tembilahan. Pada tahun 2007 memulai Pendidikan jenjang

Sekolah Dasar di SDN 019 Tembilahan. Lulus pada tahun 2013. Setelah itu, Penulis melanjutkan pada MtsN 094 Tembilahan, Penulis melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA 1 Negeri Tembilahan Hulu selama 3 Tahun yaitu 2016 sampai tahun 2019. Kemudian pada tahun 2018 berkat restu dan kedua orang tua, penulis melanjutkan Pendidikan Strata-1 (S1) Tepatnya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Program Studi Administrasi Negara.

Atas berkat dan rahmat Allah Subhanahu WaTa'ala seta do'a dan dukungan dari orang-orang tercinta, akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN UNTUK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI PERKEBUNAN KELAPA OLEH DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR.”**

Di bawah bimbingan langsung Ibu Irdyanti S.IP., MA berdasarkan hasil ujian Sarjana Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial pada 30 November 2023, penulis dinyatakan LULUS dan telah berhasil menyanggah gelar Sarjana Sosial.

Bismillahirrahmanirahim, walhamdulillah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.